



# KLIPING

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Tanggal	: <b>Minggu, 21 April 2013</b>	Halaman	: <b>6</b>
Nama Media	: <b>Berita Kota</b>	Jurnalis	: <b>-</b>

## Separator Busway Berbahaya

SEPARATOR busway di depan stasiun Jakarta Kota sangat berbahaya, karena tempatnya gelap dan juga dekat dengan tikungan. Sehingga banyak pengendara motor yg jatuh dan mobil yg tersangkut di tengah-tengah. Mohon pihak terkait untuk menindaklanjutinya. Terima kasih. **085694446xxx**

## Jalan Yusuf Enggak Pernah Diaspal

ASSALAMUALAIKUM. Pak Jokowi, kenapa Jalan Yusuf, Sukabumi Utara tidak pernah diaspal? Kemana dananya menguap? H. Santoso, Jalan Yusuf, Sukabumi Utara. **02197091xxx**

Artis kan publik pigur yang dicontoh. Contohnya enggak baik. **085710829xxx**

## Putaran Jalan di Roxy Dibuka

KEPADA yang terhormat Bapak Jokowi, kami para pengemudi sepeda motor mengimbau agar putaran (U-Turn) Roxy dibuka agar kami tidak kejauhan mutar ke arah stasiun Tanah Abang. Tolong ditindaklanjuti. **083874885xxx**

## Warga Daerah Bikin KTP DKI

GARA-GARA program Kartu Jakarta Sehat (KJS), sekarang banyak orang-orang daerah bikin KTP DKI, supaya dapat berobat gratis. Sebenarnya yang pantas jadi warga DKI itu siapa sih? **083879888xxx**

## Fogging Tidak Efektif

SAYA heran dengan Dinkes DKI, katanya fogging tdk efektif untuk mematikan nyamuk DBD. Namun kenapa setelah ada korban, baru diadakan fogging, apa setelah ada korban/tumbal fogging baru efektif membunuh nyamuk DBD? **081381738xxx**

## Pengamen kayak Preman

PENGAMEN sudah kayak preman di Kebon Jeruk arah Tangerang dan sebaliknya. Tolong ditindak pak, apalagi sore pas orang pulang kerja. **081316346xxx**

## Tanggapan Pencitraan Jokowi

KR judul "Jokowi Jangan Hanya Berwacana" untuk pengirim 082112410xxx, Anda mau kritik membangun atau cuap-barisan "sakit hati". Biaya pencitraan 50 miliar utk media, tolong Anda jelaskan media mana yg menerima dan dari pos anggaran mana yg bayar. Barangkali di Pemprov DKI ada yg namanya pos anggaran pencitraan, biar jelas gak jd fitnah. Aturan ganjil genap kan buat warga DKI, Jokowi mewacanakan tentu dipelajari dan dibahas dinas terkait. Kalau penerapan diundur atau tak jadi sekalipun itu berdasarkan kajian Dishub, polisi dll. Mungkin lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Kalo boleh egois itu tak masalah buat Jokowi, Gubernur sudah disediakan voorijder kemana pun dia pergi. **081385942xxx**